



LAPORAN KINERJA

Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian

2024

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Biro OKK), Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Biro OKK), Sekretariat Jenderal DPD RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

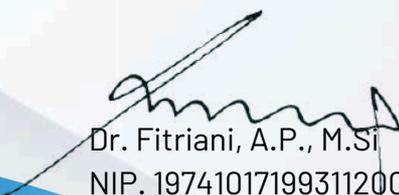
Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Biro OKK. Kinerja Biro OKK diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro OKK Tahun 2024.

Secara Umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap aparatur negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bagian integral dari sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Biro OKK Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro OKK pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian,
Sekretariat Jenderal DPD RI,


Dr. Fitriani, A.P., M.Si
NIP. 197410171993112001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Biro OKK), Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Biro OKK Tahun 2024. Biro OKK pada tahun 2024 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan total 9 (sembilan) indikator kinerja, dan 9 (sembilan) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 9 (sembilan) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 7 (tujuh) target;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Biro OKK Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian.	4	4	100%
2	Nilai manajemen perubahan	Indeks BerAKHLAK	60%	72,2%	120,33%
3	Nilai penataan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Kebijakan	65,00	65,00	100%
4	Nilai penataan dan penguatan organisasi	1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70,21	70,21	100%
		2. Nilai Evaluasi Kelembagaan	5,0	5,0	100%
5	Nilai Penataan Tata Laksana	1. Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	3	3	100%
		2. Survei Kepuasan Masyarakat	84,00	86,01	102.39%
6	Nilai penataan sistem manajemen SDM	Indeks Sistem Merit	342	342	100%
7	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	Rasio rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian	100%	100%	100%





Bab I Pendahuluan

■ Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian



Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian adalah unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang organisasi dan tata laksana, keanggotaan dan kepegawaian, hukum, serta kerja sama.

■ Tugas & Fungsi

- Penyiapan koordinasi di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, keanggotaan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan hukum,
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, keanggotaan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan hukum,
- Pelaksanaan dukungan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, keanggotaan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan hukum,
- Pengelolaan data, informasi, arsip anggota dan pegawai
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022, Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian terdiri atas:

- Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian;
- Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- Bagian Hukum





Bab II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja di tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024, Renstra Kedeputusan Bidang Administrasi Tahun 2020-2024, Renstra Biro OKK serta capaian kinerja tahun 2021-2023.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) Setjen DPD RI yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Setjen DPD RI, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Sedangkan Renstra Biro OKK merupakan platform Unit Biro OKK atas pelaksanaan Visi dan Misi Setjen DPD RI dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Biro OKK.

Mengingat Biro OKK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPD RI, maka Visi, Misi, dan Tujuan Biro OKK yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

Visi

Terwujudnya Dukungan SDM, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Layanan Hukum, serta Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian yang profesional, akuntabel dan modern

Misi

1. Melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan kesekretariatan jenderal DPD RI yang profesional;
2. Melaksanakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional;
3. Melaksanakan pelayanan hukum yang profesional; dan
4. Melaksanakan pengadministrasian keanggotaan dan kepegawaian yang profesional.



■ Rencana Strategis

Tujuan

1. Terwujudnya dukungan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang secara profesional mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI;
2. Terwujudnya dukungan SDM yang secara profesional mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI;
3. Terwujudnya dukungan sistem keadministrasian keanggotaan dan kepegawaian yang tertib dan modern; dan
4. Terwujudnya dukungan pelayanan hukum yang tertib dan akuntabel.

Sasaran

1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional;
3. Melaksanakan pelayanan hukum yang profesional; dan
4. Melaksanakan pengadministrasian keanggotaan dan kepegawaian yang profesional.





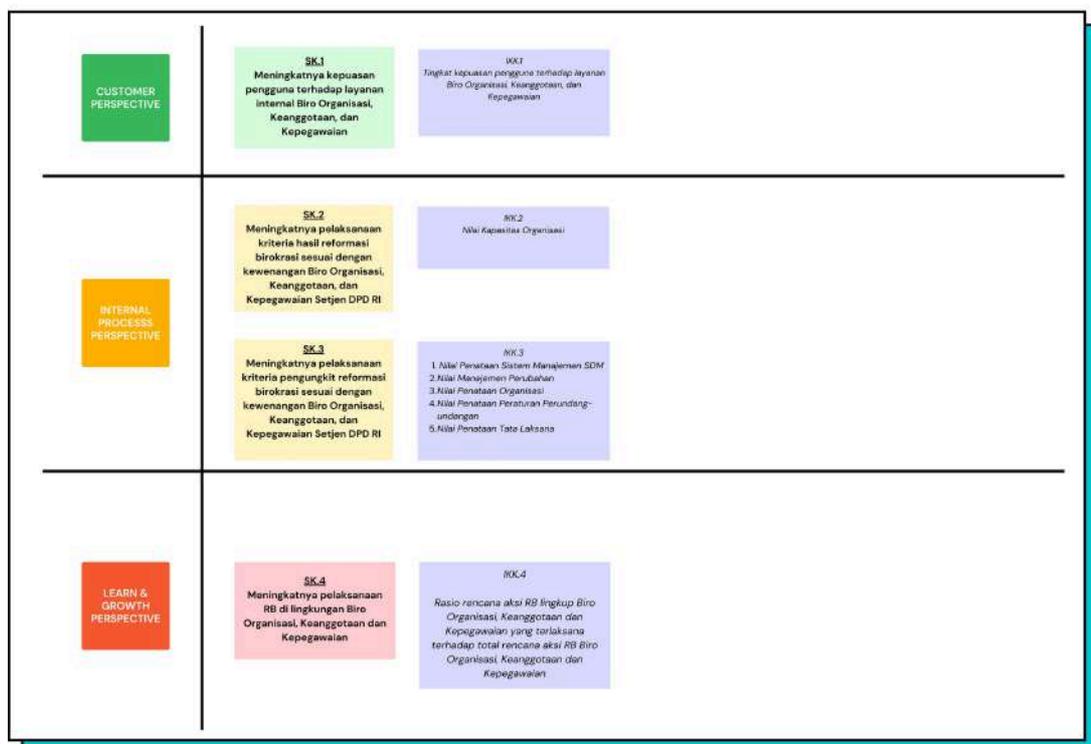
Peta Strategi

BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Biro OKK menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



PETA STRATEGI Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian



Peta Strategi Biro OKK Tahun 2020-2024

Biro OKK telah melakukan reviu terhadap peta strategi di Lingkungan Biro OKK yang memuat sasaran kegiatan dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi khususnya di Lingkup Biro OKK sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Biro OKK secara optimal. Secara umum, terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Biro OKK Tahun 2020-2024, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak relevan lagi dengan sistem dan kebijakan di atasnya (suprasistem);
- Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari pusat.





Revisi Indikator Kinerja

BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Biro OKK telah melakukan reviu terhadap peta strategi di Lingkungan Biro OKK yang memuat sasaran kegiatan dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi khususnya di Lingkup Biro OKK sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Biro OKK secara optimal. Secara umum, terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Biro OKK Tahun 2020-2024, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak relevan lagi dengan sistem dan kebijakan di atasnya (suprasistem);
- Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Kebijakan ini menghapuskan 8 (delapan) area perubahan menjadi RB General dan RB Tematik. Penyesuaian indikator tersebut, antara lain:
 - a. "Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM" menjadi "Indeks Sistem Merit"
 - b. "Nilai Manajemen Perubahan" menjadi "Indeks BerAKHLAK"
 - c. "Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi" menjadi "Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi" dan "Nilai Evaluasi Kelembagaan"
 - d. "Nilai Penataan Tata Laksana" menjadi "Tingkat Penyesuaian Sistem Kerja" dan "Survei Kepuasan Masyarakat"
 - e. "Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan" menjadi "Indeks Kualitas Kebijakan"





Revisi Indikator Kinerja

BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Berdasarkan penyesuaian/revisi IKU Biro OKK tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Biro OKK sebagai berikut:



PETA STRATEGIS HASIL REVIU Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian

CUSTOMER PERSPECTIVE	SK.1 Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	IKU.1 Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SK.2 Meningkatnya pelaksanaan kriteria hasil reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI	IKU.2 Indeks Pelayanan Publik
	SK.3 Meningkatnya pelaksanaan kriteria pengungkit reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI	IKU.3 1. Indeks Sistem Merit 2. Indeks BerAKHLAK 3. Nilai Evaluasi Kolembagaan 4. Persentase Produk Hukum Sekretariat Jenderal Yang Disusun 5. Persentase SOP yang disusun sesuai dengan rencana yang ditetapkan
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SK.4 Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian	IKU.4 1. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Biro OKK 2. Persentase ASN OKK Yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik

Revisi Indikator Kinerja Biro OKK Tahun 2020-2024



Indikator Kinerja Tahun 2024 (versi Revisi)

Indikator Kinerja Biro OKK Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Revisi Indikator Kinerja Biro OKK Tahun 2024 ditetapkan pada bulan Juli 2024. Lampiran Indikator Kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target dari setiap indikator. Matriks Indikator Kinerja Biro OKK Tahun 2024 seperti pada tabel berikut

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian.	4
2	Nilai manajemen perubahan	Indeks BerAKHLAK	60,00
3	Nilai penataan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Kebijakan	65,00
4	Nilai penataan dan penguatan organisasi	1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 2. Nilai Evaluasi Kelembagaan	70,21 5,0
5	Nilai Penataan Tata Laksana	1. Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi 2. Survei Kepuasan Masyarakat	3
6	Nilai penataan sistem manajemen SDM	Indeks Sistem Merit	342
7	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	Rasio rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian	100%





Pagu Anggaran Tahun 2024

BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Biro OKK mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp. 27.610.587.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen	Rp. 27.610.587.000,-

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Biro OKK yang mengacu pada arah kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI. Arah kebijakan Biro OKK tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 6 kegiatan utama oleh 4 (empat) Bagian dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 6 kegiatan utama yaitu:

- a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- b. Layanan Bantuan Hukum
- c. Layanan Manajemen SDM, Layanan Administrasi Keanggotaan
- d. Layanan Pendidikan Kedinasan
- e. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
- f. Layanan Reformasi Kinerja





Bab III Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kinerja Organisasi

BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

Capaian kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian tahun 2024 menggambarkan capaian sasaran program Biro OKK yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja terakhir termasuk penyesuaian target kinerja. Data capaian diperoleh dari perbandingan target dan realisasi indikator kinerja.

Capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian sasaran strategis dan berdasarkan hasil evaluasi didapatkan capaian kinerja tahun 2024. Ringkasan capaian kinerja Biro OKK Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian.	4	4	100%
2	Nilai manajemen perubahan	Indeks BerAKHLAK	60%	72,2%	120,33%
3	Nilai penataan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Kebijakan	65,00	65,00	100%
4	Nilai penataan dan penguatan organisasi	1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	70,21	70,21	100%
		2. Nilai Evaluasi Kelembagaan	5,0	5,0	100%
5	Nilai Penataan Tata Laksana	1. Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	3	3	100%
		2. Survei Kepuasan Masyarakat	84,00	86,01	102,39%
6	Nilai penataan sistem manajemen SDM	Indeks Sistem Merit	342	342	100%
7	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	Rasio rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian	100%	100%	100%



Analisis Capaian Kinerja - 1



Sasaran 1

Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian



Indikator Sasaran 1

Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian.

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan Biro OKK. Survei dilakukan dengan metode Likert terhadap pengguna layanan utama, seperti pegawai internal dan mitra eksternal yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	4	4	100%

Kepuasan internal Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap layanan dukungan Biro OKK merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II, III dan Kantor Daerah) terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro OKK. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen/administratif yang dilakukan oleh di unit kerja di lingkup Biro OKK. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Biro OKK.



Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024, target tercapai sepenuhnya. Pencapaian ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang mencakup seluruh ASN Setjen DPD RI melalui Diklat Udemmy, Kegiatan Pelantikan dan Orientasi Anggota DPD RI Periode 2024-2029 yang berjalan lancar, serta pelaksanaan rekrutmen PPPK yang berjalan dengan baik.

Namun, walaupun hasil survei kepuasan ASN terhadap layanan internal Biro OKK menunjukkan hasil yang cukup sempurna, masih terdapat beberapa saran dan kritik sebagai berikut:

- Beberapa responden mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). Responden menyarankan agar sosialisasi SOP lebih ditingkatkan.
- Beberapa responden mengeluhkan efektivitas diklat yang dilakukan secara online atau daring. Responden menyarankan agar diklat dilakukan secara tatap muka/offline/luring.
- Beberapa responden mengeluhkan tentang penempatan dan mutasi pegawai yang tidak sesuai. Responden menyarankan agar mutasi dan penempatan pegawai lebih disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan.
- Beberapa responden mengeluhkan tentang kecepatan pembuatan produk hukum. Responden menyarankan pembuatan produk hukum untuk dapat dipercepat.

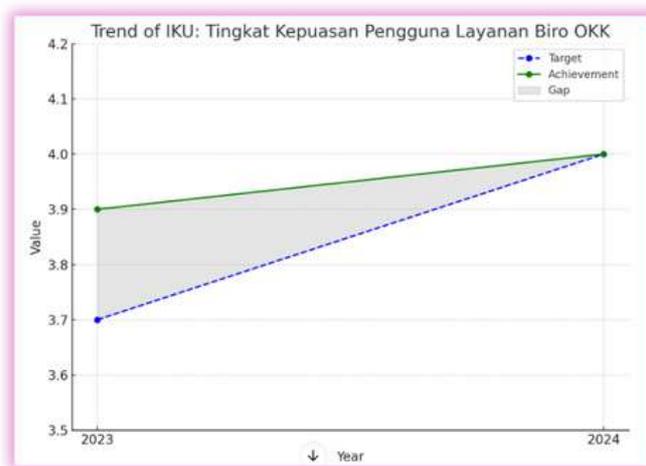
Tren dan Gap Capaian Indikator Kinerja

Tren dan gap untuk Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Biro OKK adalah sebagai berikut:

Tren dan gap untuk IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Biro OKK adalah sebagai berikut:

- 2023: Capaian 3,9 dibandingkan target 3,7 menghasilkan gap positif sebesar 0,2.
- 2024: Capaian 4 memenuhi target 4, sehingga tidak ada gap.

Grafik di atas menggambarkan tren pencapaian yang konsisten dengan target, menunjukkan keberhasilan mempertahankan kualitas layanan.



Sedangkan, capaian kinerja sasaran strategis diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$= \frac{(\text{Capaian kinerja})}{(\text{Target kinerja})} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian” tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dengan demikian, sasaran kegiatan berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran kegiatan.

Kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan

1. Layanan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2. Layanan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
3. Layanan Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Pengajuan Usul Nomenklatur Jabatan
4. Layanan Penyusunan dan Konsolidasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang terbaru
5. Layanan Penyusunan SOP Mikro Unit Kerja
6. Layanan Penyusunan Standar Pelayanan Unit Kerja
7. Layanan Asistensi dan Pembinaan PEKPPP terhadap Unit Lokus Evaluasi
8. Layanan Asistensi dan Pembinaan Kegiatan Utama RB General dan RB Tematik
9. Layanan Pembinaan Budaya Kerja BerAKHLAK
10. Layanan Pembinaan Unit Kerja yang diusulkan pada Zona Integritas
11. Layanan Diskusi dan Konsultasi seputar Kebijakan Reformasi Birokrasi

b. Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian

1. Layanan Dukungan Administrasi Anggota DPD RI,
2. Layanan Fasilitasi Naskah Dinas Kegiatan Anggota DPD RI
3. Layanan Administrasi Pengangkatan, Pelantikan, Pengganti Antar Waktu, dan Pensiun Anggota DPD RI
4. Layanan Asistensi Penilaian dan Monitoring Kinerja Pegawai Setjen DPD RI
5. Layanan Administrasi Kepegawaian, berupa Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Kesehatan, Pensiun Pegawai Setjen DPD RI, dll.
6. Layanan Kesejahteraan Pegawai Setjen DPD RI

c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Setjen DPD RI
2. Layanan Rekomendasi Pemberian Beasiswa
3. Layanan Rekomendasi dan Administrasi Tugas Belajar dan Izin Belajar
4. Layanan Pembinaan dan Dukungan Administrasi Jabatan Fungsional
5. Layanan Kerjasama SDM dan Magang
6. Layanan Assessment Pegawai dan Pembinaan Karir Pegawai

d. Bagian Hukum

1. Layanan Penyusunan Produk Hukum Setjen DPD RI,
2. Layanan Dokumentasi Produk Hukum Setjen DPD RI
3. Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum di lingkungan Setjen DPD RI



e. Klinik Pratama DPD RI

1. Layanan Poli Umum
2. Layanan Poli Gigi
3. Layanan Laboratorium
4. Layanan Fisioterapi
5. Layanan Akupunktur
6. Layanan Farmasi

Sepanjang tahun 2024, layanan Biro OKK yang menunjang capaian indikator untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPD RI dan masyarakat pengguna layanan, antara lain:

1. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Pengganti Antarwaktu Anggota DPD RI 2019 - 2024

Dukungan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Anggota DPD RI pengganti antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta atas nama H.A.Hafidh Asrom, nomor anggota BA-56 Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Anggota DPD RI pengganti antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan atas nama Gede Ngurah Ambara Putra, SH. nomor Anggota BA-65 Perwakilan Provinsi Bali.



2. Layanan Administrasi Pensiun Mantan Pejabat Negara (Mantan Anggota DPD RI)

Diskusi dan konsultasi manajemen keanggotaan terkait administrasi pensiun mantan pejabat negara bersama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan PT.Taspen (Persero) hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024.



3. Sosialisasi Aplikasi Administrasi Pensiun Pejabat Negara (KANJENK)

Sosialisasi menggunakan Aplikasi KANJENK sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas pengajuan dan pendataan pensiun pejabat negara Anggota DPD RI pada akhir periode masa jabatan 2019-2024



MANAJEMEN DATA PERSONAL

Show: 100 entries

No	Nama	No KTP	Jabatan	Status Jabatan	Aksi
1	Ir. AA LA NYALA MAHMUD MATTALITTI, M.HP	3378261005590002		Belum Pernah Menjabat	
2	AA ONI SUWARMAN, A.Md	3273200503780003		Belum Pernah Menjabat	
3	H. ABDI SUMATHI	3173060404490005		Belum Pernah Menjabat	
4	K.H., U. ABDUL HAQIM, M.M.	3174080409630001		Belum Pernah Menjabat	
5	Dr. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si	3176061907680005		Belum Pernah Menjabat	
6	Dr ABDUL RACHMAN THAHA, S.H.,M.H	7371091709790012		Belum Pernah Menjabat	

Showing 1 to 100 of 135 entries

Previous 1 2 Next

4. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bersama Lemhannas RI

Diskusi dan konsultasi persiapan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai kebangsaan bagi Anggota DPD RI terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029 bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada tanggal 20 Maret 2024.



5. Layanan Kegiatan Orientasi Anggota DPD RI Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Dalam rangka penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui penyelenggaraan kegiatan ketatanegaraan tahun 2024-2029 dan berdasarkan Keputusan Panitia Musyawarah Nomor 7/PANMUS-DPD RI/IV/2023-2024 tentang Jadwal dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 April 2023, DPD RI menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi Anggota DPD RI Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan tema DPD RI **Dari Daerah Untuk Indonesia Mewujudkan Parlemen Modern.**

Orientasi Anggota DPD RI Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2024 di Hotel Ayana, Jakarta dan 22-25 September 2024 di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta.



6. Pelantikan Anggota DPD RI Masa Jabatan 2024-2029

Dukungan pelaksanaan pelantikan terhadap 152 Anggota DPD RI Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan.



7. Layanan Kesehatan dan Pengurusan Administrasi Asuransi Kesehatan Anggota DPD RI

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014, Kementerian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara memproses layanan kesehatan bagi pejabat negara yang dapat diakses melalui situs gaji.kemenkeu.go.id

Gaji MODUL SATKER PNS Setting Pegawai Monitoring

Role User

182 - 465224 (00) - SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI (SEKRETARIAT JENDERAL DPD)

Dewi Mariastuty M.

PEJABAT NEGARA

Tampilan 10 entri

DEPARTEMEN	JAMKESMEN				JAMKESSTAMA				TOTAL PEJABAT TERDAFTAR
	PEJABAT	PASANGAN	ANAK	TOTAL	PEJABAT	PASANGAN	ANAK	TOTAL	
(095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	10	9	15	34	152	124	189	465	161
TOTAL	10	9	15	34	152	124	189	465	161

Tampilan 1 sampai 1 dari 1 entri

Total Pejabat Negara Terdaftar adalah Jumlah Pejabat yang terdaftar di Jamkesmen dan Jamkestama beserta pejabat yang baru didaftarkan.

Gaji MODUL SATKER PPNPN Setting Pegawai Monitoring

Role User

182 - 465224 (00) - SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI (SEKRETARIAT JENDERAL DPD)

Dewi Mariastuty M.

DAFTAR PEJABAT NEGARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Tampilan 100 entri

NOMOR	AKSI	NAMA	NIP	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	UNIT	JABATAN	STATUS	JAMKES	JUMLAH PESERTA
10		A ABD WARIS HALID, SS., MM				LAKI-LAKI	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	ANGGOTA DPD RI	Aktif - Tebit Nomor Peserta	Jamkestama	4 jiwa
11		A. IAN ALI BAAL MASDAR				LAKI-LAKI	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	ANGGOTA DPD RI	Aktif - Tebit Nomor Peserta	Jamkestama	5 jiwa
1		A. PUTERA PRATAMA MANSIWA				LAKI-LAKI	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	STAF KHUSUS WAJIB, KETUA DPD RI (GKR, HENAS)	Aktif - Tebit Nomor Peserta	Jamkesmen	3 jiwa
12		AAIYA RINA CASMAWANTI				PEREMPUAN	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	ANGGOTA DPD RI	Aktif - Tebit Nomor Peserta	Jamkestama	4 jiwa
13		ABCANDRA MUHAMMAD AKBAR SUPRATMAN				LAKI-LAKI	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	ANGGOTA DPD RI	Aktif - Tebit Nomor Peserta	Jamkestama	1 jiwa



8. Pembekalan Tugas dan Fungsi Staf Anggota DPD RI Bidang Keahlian dan Bidang Administrasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian menyelenggarakan pembekalan bagi Staf Anggota DPD RI pada hari Selasa-Rabu, tanggal 5 - 6 November 2024 di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta.



9. Layanan Kesehatan dan Pengurusan Administrasi Asuransi Kesehatan Staf Ahli Anggota DPD RI

Dalam rangka melaksanakan tugas fungsinya menjamin kesejahteraan Anggota DPD RI dan perangkatnya, Biro OKK memberikan dukungan layanan kesehatan melalui Klinik Pratama DPD RI serta layanan pengurusan Asuransi Kesehatan bagi staf Anggota DPD RI bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.



Kartu Peserta Digital (KIS Digital)

Simplifikasi dan kemudahan dalam memiliki identitas peserta, yang dapat diakses melalui Mobile JKN berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital.

Layanan Aplikasi Mobile JKN salah satunya KIS DIGITAL



10. Layanan Pengurusan Administrasi Staf Ahli Anggota DPD RI Bidang Keahlian dan Bidang Administrasi

Untuk mendukung kinerja Anggota DPD RI secara personal, Anggota DPD RI membutuhkan beberapa orang Staf Ahli yang direkrut selama masa sidang sesuai dengan kebutuhan Anggota DPD RI itu sendiri. Biro Okk memfasilitasi perekrutan Staf Ahli Anggota DPD RI, dengan rincian sebagai berikut:

- Staf Anggota bidang keahlian sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketentuan 2 (dua) orang berkedudukan di ibu kota negara, dan 1 (satu) orang berkedudukan di ibu kota provinsi.
- Staf Anggota bidang administrasi sebanyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan masing-masing 1 (satu) orang berkedudukan di ibu kota negara dan ibu kota provinsi

Selama kurun waktu Januari hingga Desember 2024, terjadi pergantian staf Anggota DPD RI sejumlah 69 orang, dengan rincian: Staf Anggota Bidang Keahlian sebanyak 40 orang dan Staf Anggota Bidang Administrasi sebanyak 29 orang.

Selama kurun waktu Januari hingga Desember 2024, terjadi pergantian staf Anggota DPD RI sejumlah 69 orang, dengan rincian: Staf Anggota Bidang Keahlian sebanyak 40 orang dan Staf Anggota Bidang Administrasi sebanyak 29 orang.

11. Layanan Magang bagi Siswa Sekolah Menengah dan Mahasiswa

Dalam rangka mendukung program Kampus Merdeka bagi para Mahasiswa dan peningkatan kapasitas pendidikan keterampilan bagi pelajar SMA/SMK, Biro OKK melaksanakan pengembangan kerjasama dengan universitas dan Sekolah Menengah melalui kesempatan mahasiswa dan para pelajar untuk magang di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI baik di Pusat maupun di seluruh Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Sepanjang tahun 2024, jumlah Mahasiswa dari seluruh Indonesia yang terlayani untuk magang sebanyak 206 orang dan pelajar SMK/SMA di DKI Jakarta sebanyak 281 orang.

12. Layanan Pengelolaan Jamuan Rapat

Selain menjalankan tugas fungsinya, Biro OKK melalui Subbagian Kesejahteraan, Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian diamanahi untuk mengemban tugas tambahan yaitu:.

- Pengelolaan Pertanggungjawaban (SPK) Konsumsi Rapat Anggota DPD RI.
- Pengelolaan Pertanggungjawaban (SPK) Konsumsi Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPD RI :
 - a. Biro Persidangan I yang terdiri dari:
Komite I, Komite III, BKSP, BULD dan PPUU
 - b. Biro Persidangan II yang terdiri dari:
Komite II, Komite IV, BAP, BK, Sidang Paripurna/Panmus
- Pengelolaan Pertanggungjawaban (SPK) Konsumsi Sekretariat Jenderal DPD RI
- Pengelolaan Pertanggungjawaban (SPK) Konsumsi Sidang Bersama DPD, DPR dan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2024



Analisis Capaian Kinerja - 2



Sasaran 2

Nilai Manajemen Perubahan



Indikator Sasaran 2



Indeks BerAKHLAK

Realisasi Indikator "Indeks BerAKHLAK" Tahun 2024 adalah 72,20 dari target **60,00** sehingga capaian indikator adalah **120,33%**. Capaian ini jauh melampaui ekspektasi yang ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2. Nilai Manajemen Perubahan	3,50	72,20	120,33%
	2. Indeks BerAKHLAK	60,00		

Indeks diukur berdasarkan survei budaya kerja internal dan pendekatan *desk-evaluation* data dukung. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

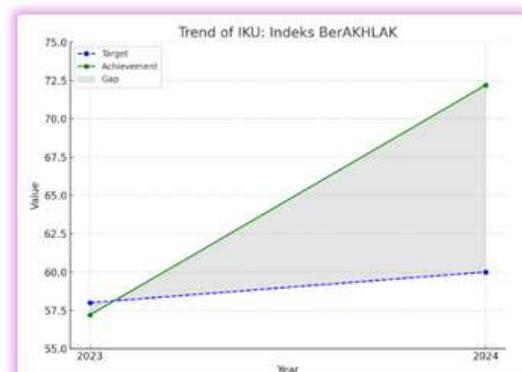
$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Pencapaian ini secara signifikan jauh di atas capaian Tahun 2023. Di tahun 2023, Indeks BerAKHLAK Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebesar 57,20 dari target sebesar 58,00, sehingga capaian Tahun 2023 hanya sebesar 98,62. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, capaian Indeks BerAKHLAK secara signifikan melebihi target yang ditetapkan.

Tren dan Gap Capaian Indikator Kinerja

Tren dan gap untuk IKU Indeks BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

- 2023: Capaian 57,2 dibandingkan target 58 menghasilkan gap negatif sebesar -0,8.
- 2024: Capaian 72,2 dibandingkan target 60 menghasilkan gap positif sebesar 12,2.



Penilaian Indeks BerAKHLAK dilakukan secara eksternal oleh Kementerian PAN RB selaku K/L Meso atau *leading institution* dalam pelaksanaan kegiatan utama RB General. Penilaian ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Survei Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi di antaranya mengenai implementasi core values BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan nilai organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Penerapan budaya kerja berlandaskan BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif diharapkan diinternalisasikan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Kategori Penilaian Indeks Implementasi BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A=Sehat	78%-100%	Nilai-nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu dalam organisasi tersebut.
B= Cukup Sehat	50%-74.9%	Pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik.
C= Tidak sehat	25%-49.9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D= Sangat tidak sehat	0%-24.9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari.

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Nilai Manajemen Perubahan” dengan Indikator Kinerja Indeks BerAKHLAK tahun 2024 adalah sebesar 72,20 % dengan kategori B (Cukup Sehat). Peningkatan signifikan sebesar 15 poin dari tahun 2023 menunjukkan efektivitas program internalisasi nilai BerAKHLAK, seperti Kegiatan Implementasi Nilai BerAKHLAK. Tantangan implementasi Budaya Kerja berAKHLAK melibatkan konsistensi dalam pelaksanaan budaya kerja.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan Benchmarking implementasi BerAKHLAK ke Instansi Praktik Baik

Kunjungan studi orientasi ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, dengan tema “Penerapan Core Values BerAKHLAK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI” yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat.



2. Pelaksanaan Knowledge Sharing Setjen DPD RI

Kegiatan knowledge sharing yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan di hari Jum'at Minggu ke- III oleh Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan Setjen DPD RI mengungkap berbagai tema yang mencerminkan nilai BerAKHLAK. Knowledge Sharing ini rutin secara berkala diposting pada Instagram perpustakaanpdri.



3. Pelaksanaan Apel Pagi setiap Hari Senin

Dalam rangka memperkuat jalinan komunikasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI dengan seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI baik di Pusat maupun di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Biro OKK mengoordinasikan pelaksanaan Apel Pagi setiap hari Senin yang pelaksanaannya secara dipimpin secara bergiliran oleh para JPT Pratama dan Unit Eselon II melalui media daring. Dalam pertemuan Apel Pagi ini, Pimpinan Unit Eselon II dapat melaporkan progress kinerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pegawai. Selain itu, kegiatan Apel Pagi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan memacu semangat pegawai.



4. Pelaksanaan Senam Kebugaran oleh Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI

Untuk memastikan Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dapat berkinerja secara profesional, Biro OKK berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai tidak hanya dari aspek rohani, tetapi juga jasmani. Sepanjang tahun 2023-2024, Biro OKK secara berkala memfasilitasi Senam Kebugaran bagi Pegawai di hari Jumat Pagi. Selain mengadakan di Kantor Pusat, Biro OKK juga mendorong para Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama. Tujuan dari kegiatan ini agar pegawai memiliki jasmani yang kuat dan sehat serta meningkatkan *wellbeingness* pegawai.



5. Pelaksanaan Diskusi Budaya Kerja NGOPI JOSS (NGupas toPlk di Jumat Sambil Ngobrol- Ngobrol Santai)

Setjen DPD RI melalui Biro OKK menyelenggarakan kegiatan diskusi santai yang membuka ruang bagi pegawai, untuk mencurahkan persepsinya kepada pimpinan tentang harapan pegawai dalam rangka kemajuan organisasi. Kegiatan perdana NGOPI JOSS dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Biro OKK sebagai unit kerja yang mengisi acara. Acara dihadiri dan dibuka oleh Plh. Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang seluruh pegawai baik di kantor pusat maupun di Kantor Daerah.



Analisis Kendala pada Hasil Capaian Indikator

Nilai BerAKHLAK	2023	2024
Berorientasi Pelayanan	54.6	70,0
Akuntabel	66.7	75,0
Kompeten	54.6	73,0
Harmonis	48.0	74,0
Loyal	64.8	77,0
Adaptif	47.3	74,0
Kolaboratif	64.5	72,0
Total Nilai	57.2	72,20

Berdasarkan hasil evaluasi organisasi oleh Kementerian PAN RB pada penilaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2024, terdapat beberapa catatan, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal DPD RI sudah melakukan publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi, akan tetapi tidak rutin.
2. Untuk sosialisasi BerAKHLAK berupa konten Podcast perlu diperbanyak kuantitasnya;
3. Pada penyusunan kebijakan implementasi BerAKHLAK perlu ada penjelasan spesifik terkait penggunaan BerAKHLAK dalam sistem penilaian kinerja;
4. Perlu ada penyusunan contoh perilaku spesifik dari masing-masing panduan perilaku yang sudah ada;
5. Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk pegawai/unit kerja perlu menggunakan BerAKHLAK sebagai instrumen penilaiannya .

Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian Indikator “Indeks BerAKHLAK”:

1. Benchmark ke instansi lain yang memperoleh kategori A (Sehat);
2. Mengoptimalkan internalisasi nilai BerAKHLAK khususnya “Nilai Berorientasi Pelayanan” dan “Nilai Kolaboratif” yang masih memerlukan pembinaan;
3. Pembinaan “Nilai Berorientasi Pelayanan” dilakukan dengan mengadakan kegiatan Workshop/Seminar Motivasi terkait pelayanan publik/keterampilan berkomunikasi.
4. Pembinaan “Nilai Kolaboratif” dilakukan dengan meningkatkan kegiatan capacity building/team building bagi pegawai;
5. Memperbanyak publikasi Pedoman Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dengan memperbanyak konten internalisasi Nilai-Nilai BerAKHLAK;
6. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Implementasi BerAKHLAK secara berkala (Webinar, FGD, Penguatan peran agen perubahan, dll);
7. Penyusunan Kebijakan Implementasi BerAKHLAK dalam Peraturan internal Sekretariat Jenderal DPD RI yang mencantumkan mengenai penjelasan spesifik contoh perilaku dan pemberian penghargaan dengan menggunakan instrumen BerAKHLAK;
8. Menambah kegiatan informal untuk menguatkan keharmonisan antar pegawai seperti kegiatan yang menunjang kesamaan minat dan bakat.



■ Analisis Capaian Kinerja - 3

Sasaran 3

Nilai Penataan Perundang-undangan

Indikator Sasaran 3

Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pada Tahun 2024, Indeks Kualitas Kebijakan tidak dilakukan penilaian oleh LAN RI. Sehingga pengukurannya masih menggunakan nilai Tahun 2023. Realisasi Indikator "Indeks BerAKHLAK" Tahun 2024 adalah 65,00 dari target 65,00 sehingga capaian indikator adalah **100%**. Capaian ini mencapai target kriteria "Baik".

Indeks diukur berdasarkan penilaian mandiri pada aplikasi IKK yang diterbitkan oleh LAN RI. Indeks berisikan aspek-aspek penilaian kualitas kebijakan meliputi aspek Agenda Setting Kebijakan, aspek Formulasi, aspek Implementasi Kebijakan, dan aspek Evaluasi Kebijakan. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2. Nilai Penataan Perundang-undangan	3,50	65,00	100%
	2. Indeks Kualitas Kebijakan	65,00		

Karena di tahun 2024 ini tidak dilakukan penilaian dan Sekretariat Jenderal DPD RI baru mengikuti penilaian di tahun 2023, sehingga capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Ke depannya Biro OKK mempertimbangkan apakah Sekretariat Jenderal DPD RI masih perlu untuk mengikuti penilaian IKK Tahun 2025, dikarenakan Kebijakan yang diterbitkan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI mayoritas merupakan kebijakan yang mengatur internal.

■ Analisis Capaian Kinerja - 4



Sasaran 4

Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi



Indikator Sasaran 4



Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi



Nilai Evaluasi Kelembagaan

Sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut, melalui kementerian PANRB pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan dengan mengurangi jumlah lapisan jabatan struktural yang tidak efektif dan menggantinya dengan jabatan fungsional yang lebih fleksibel dan produktif. Dengan penyederhanaan struktur organisasi ini diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih fungsi, pemborosan sumber daya, dan dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka menjalankan agenda reformasi birokrasi tersebut, khususnya yang terkait organisasi/kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam menyikapi perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan reformasi birokrasi. Melalui penataan dan penguatan organisasi/kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih konstruktif dan solutif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan percepatan proses pelayanan serta pengambilan keputusan dalam birokrasi.

Metode Pengukuran

Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dilakukan dengan menghitung Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi yang merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan. Penghitungan persentase PSO dilakukan pada Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi. Tata cara penghitungan persentase PSO dilakukan dengan rumus sebagai berikut:



$$PSO = \frac{A-B}{A-C} \times 100 \%$$

Keterangan :

Persentase PSO merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan.

A = Jumlah struktur jabatan administrasi sebelum dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah

B = Jumlah struktur jabatan administrasi setelah dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah

C = Jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) Sekretariat Jenderal DPD RI

Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan secara bertahap. Pada Tahap I dilakukan penyederhanaan terhadap 33 Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Seluruh Indonesia dengan perhitungan sebagai berikut:

A = Jumlah struktur jabatan administrasi sebelum dilakukan penyederhanaan: **281**

B = Jumlah struktur jabatan administrasi setelah dilakukan penyederhanaan: **281-33=248**

C = Jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 202: **248-14=234**

$$PSO = \frac{A-B}{A-C} \times 100 \%$$

$$PSO = \frac{281-248}{281-234} \times 100 \%$$

$$PSO = \frac{33}{47} \times 100 \%$$

$$PSO = 0.7021 \times 100 \%$$

$$PSO = 70,21 \%$$

**MATRIKS PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama Unit Organisasi	Struktur Jabatan Administrasi sebelum Disederhanakan				Struktur Jabatan Administrasi yang berpotensi Dipertahankan				Struktur Jabatan Administrasi setelah Disederhanakan			
		III	IV	V	Jumlah	III	IV	V	Jumlah	III	IV	V	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	71	210	-	281	67	167	-	234	71	177	-	248
	Total	A=			281	C=			234	B=			248

Capaian Indikator Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)

Realisasi Indikator Penyederhanaan Struktur Organisasi Tahun 2024 adalah **70,21%** dari target sama dengan tahun sebelumnya yaitu **70,21%** sehingga capaian indikator adalah **100%**. Capaian ini susai dengan target yang ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2. Nilai Penataan Organisasi Penyederhanaan Struktur Organisasi	3,50 70,21	70,21	100%

Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Dalam pemenuhan indikator Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI telah membentuk Tim Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lintas ke deputian dan telah melakukan pembahasan penyusunan mekanisme pembahasan terkait usulan Draft/Konsep Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.



■ Analisis Capaian Kinerja - 4



Sasaran 4

Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi



Indikator Sasaran 4



Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi



Nilai Evaluasi Kelembagaan

Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI

Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan secara strategis dengan memetakan dan merespon dorongan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan merespon kebutuhan internal organisasi. Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam aspek organisasi dan aspek proses perlu dilakukan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI, dilakukan pada 2 (dua) aspek penting yaitu aspek struktur organisasi dan aspek proses.

Aspek pertama yaitu aspek struktur organisasi yang merupakan aspek pokok organisasi. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan, maka diperlukan suatu instrumen evaluasi kelembagaan yang memadai, untuk dapat menilai kemampuan Sekretariat Jenderal DPD RI beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Sekretariat Jenderal DPD RI saat ini. Aspek kedua adalah aspek proses yang terjadi di dalam organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Proses organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (*alignment*) satu sama lain. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (*good governance*) dan kesesuaian/kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.



Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah, dan dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Hasil Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah dilakukan terakhir menunjukkan bahwa:

- Indeks peringkat komposit yaitu 88,82359307 (Peringkat Komposit 5 (P-5)), yang berarti Sekretariat Jenderal DPD RI dari sisi struktur dan proses, organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
- Kondisi dimensi struktur dan proses yang terjadi di Sekretariat Jenderal DPD RI tergolong sangat efektif.
- Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal Sekretariat Jenderal DPD RI tergolong sangat tinggi.
- Secara kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPD RI tidak memiliki kekurangan yang signifikan.

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari	
		max	
Kompleksitas	21,023	16%	
Formalisasi	11,607	7%	
Sentralisasi	11,932	5%	
TOTAL	44,562	11%	
Alignment	10	0%	
Governance and Compliance	8,9286	11%	
Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%	
Manajemen Risiko	8,3333	17%	
Teknologi Organisasi IT	9,5	5%	
TOTAL	44,262	11%	
Peringkat Komposit	88,82359307		

P-5		
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi		
KETERANGAN	Kondisi dimensi struktur dan proses	Sangat efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Sangat tinggi
	kekurangan	-



Sekretariat Jenderal DPD RI juga telah membentuk Tim Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lintas ke deputian berdasarkan Surat Tugas Nomor : OT.00/279/DPDRI/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan telah diperbaharui dengan Surat Tugas Nomor: OT.00/895/DPDRI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan pembahasan penyusunan Mekanisme Pembahasan Terkait Usulan Draft/Konsep Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

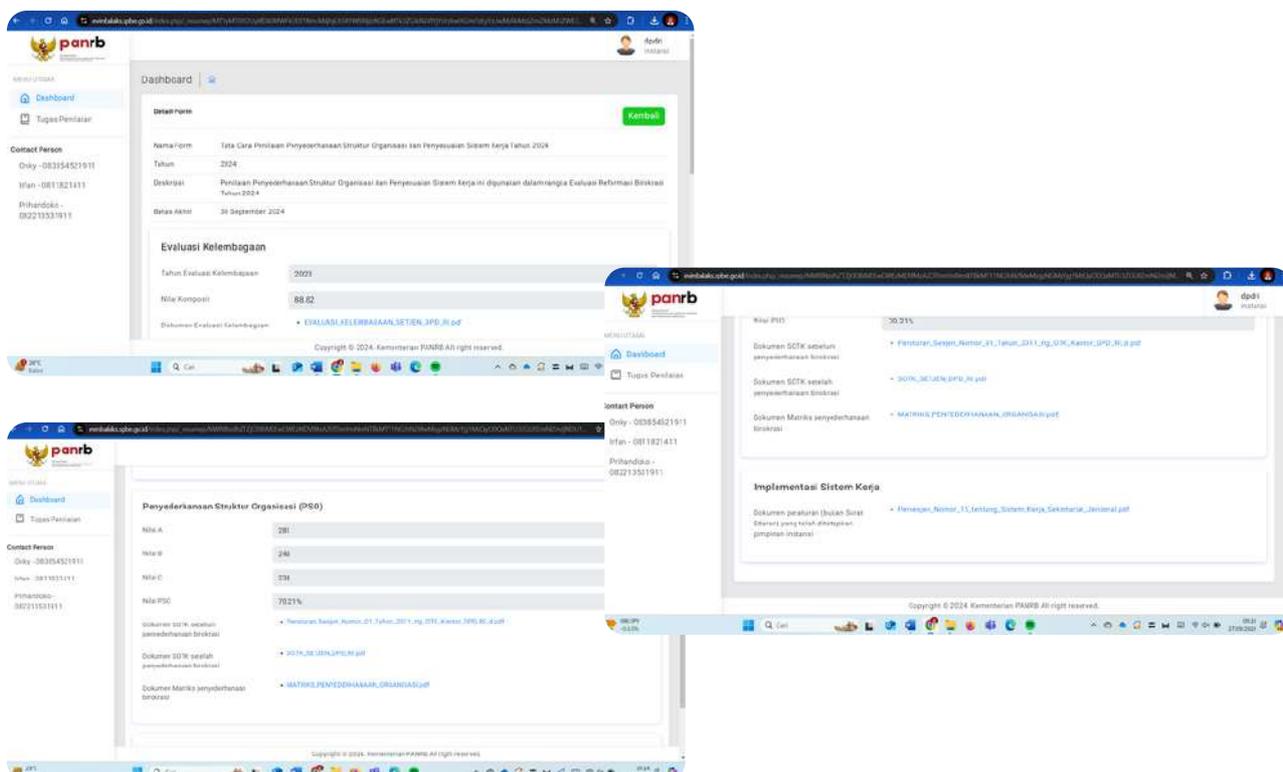
Selanjutnya Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyampaikan pelaporan penilaian mandiri terhadap indikator antara lain:

- 1) Nilai Komposit Evaluasi Kelembagaan: 88,82 (P5),
- 2) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO): 70,21%, dan
- 3) Tingkat Penerapan Sistem Kerja: level 3 pada tautan <https://evinbalaks.spbe.go.id>.

pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 pukul 09.10 WIB dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dan Surat Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor: B/406/KT.02/2024 Hal: Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Terlampir pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/19q45lik9NpaxPhj3pln5rySBqxhrxfFT?usp=sharing>
<https://drive.google.com/drive/folders/1rIMpCC9BmS5rg2TYFF64oOy7ni0dDhNW>



Kegiatan Penyusunan dan Reviu SOP Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian telah melakukan penyusunan dan reviu atas Standar Operasional Prosedur Sekretariat Jenderal DPD RI mengacu kepada Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan meliputi:

Reviu SOP Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan terkait dengan SOP Pengelolaan Permohonan Informasi sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 980 Tahun 2023. Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan selama Tahun 2024 juga telah melakukan penyusunan dan penetapan SOP Mikro yang digunakan sebagai data dukung didalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh KEMENPAN RB RI antara lain:

- Koordinasi Penerimaan Delegasi
- Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Delegasi
- Pembuatan Materi Kunjungan Delegasi

Selain itu Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan juga telah melakukan penyusunan SOP Mikro terkait dengan

- Pengelolaan Publikasi Melalui Website
- Pengelolaan pelaporan LAPOR di Sekretariat Jenderal DPD RI

Sebagai tindaklanjut Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Awal dari BPK RI, telah dilakukan pendampingan penyusunan dan penetapan SOP Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terkait dengan

- Tindaklanjut Permohonan Sewa BMN Sekretariat Jenderal DPD RI
- Permohonan Persetujuan Sewa BMN Ke KPKNL
- Penyusunan Surat Perjanjian Sewa

Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP Mikro Subbagian Kearsipan, terkait dengan:

- Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah dan usul musnah
- Pembentukan panitia penilai arsip
- Penilaian arsip usul serah dan usul musnah
- Penetapan arsip statis dan penetapan arsip musnah
- Penyerahan arsip statis ke ANRI
- Peminjaman arsip pada unit kearsipan
- Pemberkasan arsip pada central file
- Alih media arsip pada unit kearsipan

SOP Subbagian Kearsipan juga digunakan sebagai data dukung didalam kegiatan Audit Kearsipan yang dilakukan secara internal oleh Sekretariat Jenderal DPD RI maupun secara eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.



Pada tahun 2024 juga telah dilakukan pendampingan penyusunan SOP Mikro Subbagian Perpustakaan dan Penerbitan terkait dengan:

- Permintaan Pencetakan
- Administrasi Pencetakan Bahan Cetak Dibawah 50 juta
- Administrasi Pencetakan Bahan Cetak Diatas 50 juta
- Pendistribusian Bahan Cetakan
- Administrasi Penggandaan dan Penjilidan
- Pembuatan akun e-Perpus
- Penelusuran Informasi (Referensi)
- Sirkulasi Bahan Pustaka (pinjam dan kembali)
- Pemeliharaan Bahan Pustaka
- Pemutakhiran (stock opname) Bahan Pustaka
- Penyiangan Bahan Pustaka
- Pengadaan Bahan Pustaka
- Pengolahan Bahan Pustaka
- Preservasi Digital Bahan Pustaka
- Bimbingan Pemustaka

Telah dilaksanakan kegiatan Benchmarking ke BSSN pada tanggal 12 Februari 2024. Kegiatan diskusi dilakukan untuk mempelajari mekanisme Monitoring Evaluasi Proses Bisnis (Probis) dan SOP yang disusun dan dikembangkan Tim Tata Laksana BSSN, untuk selanjutnya dapat diaplikasikan pada kegiatan Monev Probis dan SOP dilingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Telah dilakukan kegiatan Benchmarking monitoring dan evaluasi Penyusunan Probis dan SOP Peta Proses Bisnis dengan Pemprov DI Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mempelajari sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) Serta penerapan sistem penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Telah dilakukan pendampingan penyusunan dan penetapan SOP Mikro dan Teknis Bagian Perencanaan terkait dengan

- Penyampaian usulan anggaran DPD RI
- Penyampaian usulan anggaran ke KEMENKEU dan BAPPENAS
- Penyusunan program dan anggaran DPD RI
- Penyusunan bahan terkait program dan anggaran DPD RI untuk KOMISI III DPR RI
- Revisi anggaran DPD RI
- Penyusunan surat usulan penambahan pagu anggaran DPD RI
- Penyusunan Pedoman Anggaran DPD RI
- Surat permintaan penyusunan dokumen SAKIP DPD RI
- Penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga
- Penyampaian surat penginputan capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi monev (KEMENKEU DAN BAPPENAS)



- Verifikasi penginputan capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi monev BAPPENAS
- Permintaan pendampingan penyusunan SAKIP
- Teknis pendampingan penyusunan SAKIP

Telah dilakukan pendampingan penyusunan SOP Mikro Bagian Gaji dan Tunjangan.

Telah dilakukan pembahasan terkait dengan penyusunan SOP Klinik Pratama Setjen DPD RI khususnya terkait dengan SOP Teknis Dokter Umum dan Dokter Gigi.

Telah dilakukan Reviu dan pendampingan penyusunan SOP Mikro Inspektorat mengacu kepada Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi terkait dengan:

- Pengendalian Gratifikasi.
- Penetapan Status Kepemilikan Obyek Gratifikasi Berdasarkan Keputusan KPK

Bagian Pengembangan Sistem Informasi didampingi oleh Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan telah melakukan penyusunan dan penetapan SOP Mikro yang digunakan sebagai data dukung pelaksanaan Monev SPBE antara lain:

- Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Internal
- Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Eksternal
- Pengelolaan Jaringan Intra Internal
- Pengelolaan Jaringan Intra Eksternal
- Pengelolaan Pusat Data

Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian juga memberikan fasilitasi terhadap Penyusunan SOP Mikro Pusat Kajian Daerah dan ANggaran terkait dengan SOP Mikro Pengelolaan Arsip Digital Puskadaran.

Telah dilakukan pendampingan penyusunan SOP Mikro Persidangan terkait dengan:

- Pengelolaan Buku Laporan Kinerja Digital PURT
- Penginputan Materi Persidangan Melalui Aplikasi Persidangan
- Pengelolaan Kelengkapan Hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri Pada Aplikasi SIKUNJALUN

Telah dilakukan Reviu atas SOP Mikro Bagian Pengembangan SDM terkait dengan:

- Penyusunan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kebutuhan Peserta Magang
- Penginputan Kebutuhan Peserta Magang Kedalam Aplikasi Sigma
- Orientasi Dan Penempatan Peserta Magang
- Monitoring Dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Magang Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
- Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Magang Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI

Pada Tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian telah melakukan penyusunan SOP Mikro kurang lebih 60 SOP Sekretariat Jenderal DPD RI dan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebanyak 50 SOP yang terdiri dari 49 SOP Mikro, dan SOP Teknis sebanyak 1 SOP.

Sampai dengan Tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan penyusunan 701 Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro, Mikro dan Teknis dari sekitar 500 SOP yang telah ditargetkan. berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian telah melakukan penyusunan SOP sebanyak 140 persen, yang digunakan sebagai acuan didalam pelaksanaan tugas untuk memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.



Pencapaian tahun 2024

- 1. SOP Mikro 49 SOP;**
- 2. SOP Teknis 1 SOP.**



**Total SOP yang dimiliki
Sekretariat Jenderal DPD RI saat
ini 701 Standar Operasional
Prosedur (SOP) Makro, Mikro dan
Teknis**

■ Analisis Capaian Kinerja - 5



Sasaran 5

Nilai Penataan Tata Laksana



Indikator Sasaran 5



Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi



Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi salah satu instrumen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. SKM dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) kepada Pengguna Layanan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan.

Unit Penyelenggara Layanan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diikutsertakan pada SKM Tahun 2024 adalah:

- Layanan Cuti-e pada Bagian Administrasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian;
- Layanan Distribusi BMN pada Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- Layanan Kunjungan Delegasi dan Permohonan Informasi Publik pada Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan,
- Layanan Kesehatan Klinik Pratama DPD RI; serta
- Layanan Magang pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Kompilasi data diolah untuk menjadi informasi di Bagian Ortala, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian. Dari hasil pengolahan mandiri data indeks SKM masing-masing UPP diperoleh Nilai SKM Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 sebesar **86,01**. Laporan SKM ini kemudian disampaikan kepada Kedeputian Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB.

Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	6. Nilai Penataan Tata Laksana Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Setjen DPD RI	3,50 84,00	86,01	102,39%

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat prioritas yang harus ditindaklanjuti di antaranya:

1. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan.
2. Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kecepatan pelayanan.
3. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kualitas sarana prasarana.

Analisis Capaian Kinerja - 6



Sasaran 6

Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM



Indikator Sasaran 6



Indeks Sistem Merit

Sistem Merit merupakan bagian dari evaluasi dari pengawasan penerapan sistem merit yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Aspek yang dinilai dalam Sistem Merit yaitu Aspek Perencanaan Kebutuhan, Aspek Pengadaan, Aspek Pengembangan Karier, Aspek Promosi dan Mutasi, Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Aspek Penghargaan dan disiplin, Aspek Perlindungan dan Pelayanan, dan Aspek Sistem Informasi.



Evaluasi Semester I

Berdasarkan data BKN, hasil evaluasi Sistem Merit Semester I Tahun 2024 mencakup 20 Instansi Pemerintah (IP) dimana hasilnya 10 IP mendapat predikat baik untuk pertama kali, 2 IP naik kategori menjadi predikat sangat baik, dan 8 IP tetap dalam kategori tahun sebelumnya yaitu baik dan sangat baik.

Evaluasi Semester II

Sedangkan pada Semester, pelaksanaan evaluasi Sistem Merit mencakup 94 IP. Dari jumlah tersebut, 17 IP naik kategori, 74 IP tidak berubah atau berkategori tetap dan 3 IP baru mengikuti penilaian pertama kali. Sekretariat Jenderal DPD RI, untuk tahun 2024 tidak mengajukan penilaian sistem merit. Kendati demikian Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen pada penyempurnaan semua aspek dalam penilaian sistem merit tetap dilaksanakan.



Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	6. Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM	350	342	100%
	6. Indeks Sistem Merit	342		

Pada Tahun 2024, Indeks Sistem Merit tidak dilakukan penilaian. Pembubaran lembaga KASN RI oleh Pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi tidak dinilainya Indeks Sistem Merit pada tahun 2024 karena sedang di masa transisi peralihan tugas fungsi ke Kementerian PAN RB dan BKN. Sehingga pengukurannya masih menggunakan nilai Tahun 2023. Realisasi Indikator "Indeks Sistem Merit" Tahun 2024 adalah 342 dari target 342, yang merupakan target untuk mempertahankan nilai yang sudah ada, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Karena di tahun 2024 ini tidak dilakukan penilaian terhadap Indeks Sistem Merit, sehingga capaiannya tidak diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan performa Indeks Sistem Merit pada aspek-aspeknya, antara lain:

1. ASPEK PERENCANAAN KEBUTUHAN

Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2024 telah mengajukan usulan kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Merujuk Surat Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Usul Rincian Formasi ASN Setjen DPD RI TA 2024 Nomor: SPTJM.URF/4050/2024.I tanggal 4 April 2024. Sesuai surat tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI mengusulkan kebutuhan ASN TA 2024 sebanyak 566 orang, yang terdiri 230 PNS dan 336 PPPK.

1. Alokasi Formasi Menpan

No	Jenis Jabatan	CPNS	PPPK
1.	Guru	0	0
2.	Tenaga Kesehatan	2	0
3.	Tenaga Teknis	228	336
Jumlah		230	336



2. Usul rincian kebutuhan ASN

No	Jenis Jabatan	CPNS	PPPK
1.	Guru	0	0
2.	Tenaga Kesehatan	2	0
3.	Tenaga Teknis	228	336
Jumlah		230	336



Rincian jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan penempatan kebutuhan ASN Tahun anggaran 2024 dari pelamar umum sebagaimana terlampir.

2. ASPEK PENGADAAN PEGAWAI

Pelaksanaan pengadaan ASN Sekretariat Jenderal DPD RII merupakan tindak lanjut atas usulan kebutuhan ASN TA 2024 yang telah diusulkan. Adapun pelaksanaan pengadaan ASN Sekretariat Jenderal DPD RI berlangsung dari bulan September 2024 sampai dengan Februari 2024.

Pengadaan CPNS dengan kebutuhan 230 formasi, jumlah peserta yang melamar sebanyak 1838 orang. Dari jumlah pelamar tersebut, sebanyak 948 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 890 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



Jenis Kelamin	Pelamar	MS	TMS
Pria	929	445	484
Wanita	909	503	406
Total	1838	948	890



Proses Pengadaan CPNS Setjen DPD RI Tahun 2024

Sedangkan untuk pengadaan PPPK dengan jumlah formasi sebanyak 336 formasi sebagaimana Surat Keputusan Menpan RB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan PPPK dilakukan dengan 2 tahap. Tahap I, formasi kebutuhan yang disediakan sebanyak 165 jabatan, dan Tahap II formasi kebutuhan yang disediakan sebanyak 171 jabatan.

Tahap I, pelaksanaan pengadaan PPPK I berlangsung pada Hari Kamis, 5 Desember 2024 bertempat di Kantor Regional V BKN, Ciracas-Jakarta.



No	Uraian	Saldo
1	Saldo Awal	0,00
2	Saldo Akhir	0,00
3	Saldo Awal	0,00
4	Saldo Akhir	0,00
5	Saldo Awal	0,00
6	Saldo Akhir	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Saldo Akhir	0,00
9	Saldo Awal	0,00
10	Saldo Akhir	0,00
11	Saldo Awal	0,00
12	Saldo Akhir	0,00
13	Saldo Awal	0,00
14	Saldo Akhir	0,00
15	Saldo Awal	0,00
16	Saldo Akhir	0,00
17	Saldo Awal	0,00
18	Saldo Akhir	0,00
19	Saldo Awal	0,00
20	Saldo Akhir	0,00
21	Saldo Awal	0,00
22	Saldo Akhir	0,00
23	Saldo Awal	0,00
24	Saldo Akhir	0,00
25	Saldo Awal	0,00
26	Saldo Akhir	0,00
27	Saldo Awal	0,00
28	Saldo Akhir	0,00
29	Saldo Awal	0,00
30	Saldo Akhir	0,00
31	Saldo Awal	0,00
32	Saldo Akhir	0,00
33	Saldo Awal	0,00
34	Saldo Akhir	0,00
35	Saldo Awal	0,00
36	Saldo Akhir	0,00
37	Saldo Awal	0,00
38	Saldo Akhir	0,00
39	Saldo Awal	0,00
40	Saldo Akhir	0,00
41	Saldo Awal	0,00
42	Saldo Akhir	0,00
43	Saldo Awal	0,00
44	Saldo Akhir	0,00
45	Saldo Awal	0,00
46	Saldo Akhir	0,00
47	Saldo Awal	0,00
48	Saldo Akhir	0,00
49	Saldo Awal	0,00
50	Saldo Akhir	0,00
51	Saldo Awal	0,00
52	Saldo Akhir	0,00
53	Saldo Awal	0,00
54	Saldo Akhir	0,00
55	Saldo Awal	0,00
56	Saldo Akhir	0,00
57	Saldo Awal	0,00
58	Saldo Akhir	0,00
59	Saldo Awal	0,00
60	Saldo Akhir	0,00
61	Saldo Awal	0,00
62	Saldo Akhir	0,00
63	Saldo Awal	0,00
64	Saldo Akhir	0,00
65	Saldo Awal	0,00
66	Saldo Akhir	0,00
67	Saldo Awal	0,00
68	Saldo Akhir	0,00
69	Saldo Awal	0,00
70	Saldo Akhir	0,00
71	Saldo Awal	0,00
72	Saldo Akhir	0,00
73	Saldo Awal	0,00
74	Saldo Akhir	0,00
75	Saldo Awal	0,00
76	Saldo Akhir	0,00
77	Saldo Awal	0,00
78	Saldo Akhir	0,00
79	Saldo Awal	0,00
80	Saldo Akhir	0,00
81	Saldo Awal	0,00
82	Saldo Akhir	0,00
83	Saldo Awal	0,00
84	Saldo Akhir	0,00
85	Saldo Awal	0,00
86	Saldo Akhir	0,00
87	Saldo Awal	0,00
88	Saldo Akhir	0,00
89	Saldo Awal	0,00
90	Saldo Akhir	0,00
91	Saldo Awal	0,00
92	Saldo Akhir	0,00
93	Saldo Awal	0,00
94	Saldo Akhir	0,00
95	Saldo Awal	0,00
96	Saldo Akhir	0,00
97	Saldo Awal	0,00
98	Saldo Akhir	0,00
99	Saldo Awal	0,00
100	Saldo Akhir	0,00



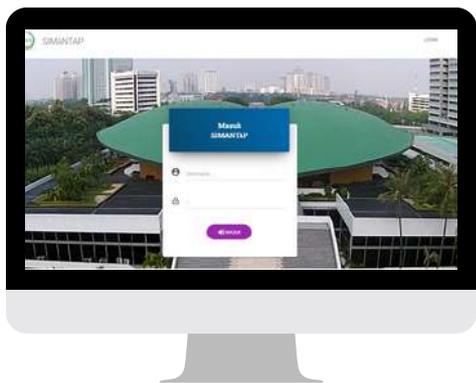
No	Uraian	Saldo
1	Saldo Awal	0,00
2	Saldo Akhir	0,00
3	Saldo Awal	0,00
4	Saldo Akhir	0,00
5	Saldo Awal	0,00
6	Saldo Akhir	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Saldo Akhir	0,00
9	Saldo Awal	0,00
10	Saldo Akhir	0,00
11	Saldo Awal	0,00
12	Saldo Akhir	0,00
13	Saldo Awal	0,00
14	Saldo Akhir	0,00
15	Saldo Awal	0,00
16	Saldo Akhir	0,00
17	Saldo Awal	0,00
18	Saldo Akhir	0,00
19	Saldo Awal	0,00
20	Saldo Akhir	0,00
21	Saldo Awal	0,00
22	Saldo Akhir	0,00
23	Saldo Awal	0,00
24	Saldo Akhir	0,00
25	Saldo Awal	0,00
26	Saldo Akhir	0,00
27	Saldo Awal	0,00
28	Saldo Akhir	0,00
29	Saldo Awal	0,00
30	Saldo Akhir	0,00
31	Saldo Awal	0,00
32	Saldo Akhir	0,00
33	Saldo Awal	0,00
34	Saldo Akhir	0,00
35	Saldo Awal	0,00
36	Saldo Akhir	0,00
37	Saldo Awal	0,00
38	Saldo Akhir	0,00
39	Saldo Awal	0,00
40	Saldo Akhir	0,00
41	Saldo Awal	0,00
42	Saldo Akhir	0,00
43	Saldo Awal	0,00
44	Saldo Akhir	0,00
45	Saldo Awal	0,00
46	Saldo Akhir	0,00
47	Saldo Awal	0,00
48	Saldo Akhir	0,00
49	Saldo Awal	0,00
50	Saldo Akhir	0,00
51	Saldo Awal	0,00
52	Saldo Akhir	0,00
53	Saldo Awal	0,00
54	Saldo Akhir	0,00
55	Saldo Awal	0,00
56	Saldo Akhir	0,00
57	Saldo Awal	0,00
58	Saldo Akhir	0,00
59	Saldo Awal	0,00
60	Saldo Akhir	0,00
61	Saldo Awal	0,00
62	Saldo Akhir	0,00
63	Saldo Awal	0,00
64	Saldo Akhir	0,00
65	Saldo Awal	0,00
66	Saldo Akhir	0,00
67	Saldo Awal	0,00
68	Saldo Akhir	0,00
69	Saldo Awal	0,00
70	Saldo Akhir	0,00
71	Saldo Awal	0,00
72	Saldo Akhir	0,00
73	Saldo Awal	0,00
74	Saldo Akhir	0,00
75	Saldo Awal	0,00
76	Saldo Akhir	0,00
77	Saldo Awal	0,00
78	Saldo Akhir	0,00
79	Saldo Awal	0,00
80	Saldo Akhir	0,00
81	Saldo Awal	0,00
82	Saldo Akhir	0,00
83	Saldo Awal	0,00
84	Saldo Akhir	0,00
85	Saldo Awal	0,00
86	Saldo Akhir	0,00
87	Saldo Awal	0,00
88	Saldo Akhir	0,00
89	Saldo Awal	0,00
90	Saldo Akhir	0,00
91	Saldo Awal	0,00
92	Saldo Akhir	0,00
93	Saldo Awal	0,00
94	Saldo Akhir	0,00
95	Saldo Awal	0,00
96	Saldo Akhir	0,00
97	Saldo Awal	0,00
98	Saldo Akhir	0,00
99	Saldo Awal	0,00
100	Saldo Akhir	0,00

Proses Pengadaan PPPK Setjen DPD RI Tahap I Tahun 2024

Sedangkan, untuk pengadaan PPPK **Tahap II**, pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana Lampiran II Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 direncanakan akan dilaksanakan pada 17 April - 16 Mei 2025.

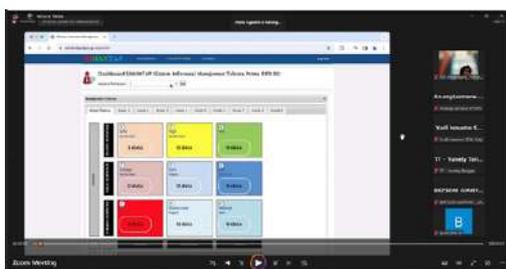
3. ASPEK PENGEMBANGAN KARIR

Kegiatan yang berkaitan dengan aspek pengembangan karir sepanjang tahun 2024 antara lain: Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP), Assestment Pegawai, Upskilling dan Reskilling Pegawai.



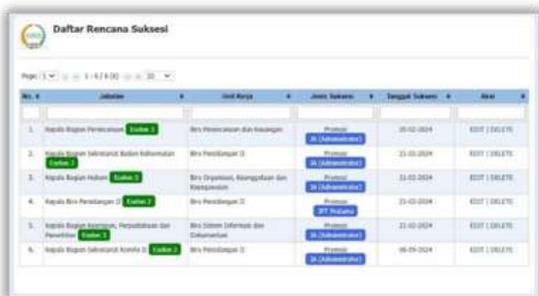
Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima

Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima adalah instrumen yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam rangka pelaksanaan pengembangan karir pegawai untuk menyiapkan talenta-talenta terbaik berdasarkan pengukuran yang obyektif, transparan, terbuka dan adil. Hal ini sudah sesuai dengan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-927/SM.01.01/03/2024 tentang Persetujuan Kebijakan dan Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 14 Maret 2024.



Menindaklanjuti surat dari KASN, Sekretariat Jenderal DPD RI berupaya menyempurnakan beberapa fitur dalam SIMANTAP dengan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- Menyempurnakan fitur Daftar Rencana Suksesi dalam SIMANTAP;
- Melakukan sosialisasi SIMANTAP kepada seluruh pegawai;
- Mengukur tingkat kesuksesan SIMANTAP; dan
- Melakukan penempatan sesuai hasil assesment.



Assesment Pegawai

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPD RI telah assesment kepada 7 (tujuh) orang pegawai yang merupakan pegawai mutasi dari instansi lain. Rincian pelaksanaannya yaitu 3 (tiga) orang pegawai mutasi dilaksanakan assesment pada tanggal 9 Maret 2024 dan 4 (empat) orang pegawai mutasi dilaksanakan assesment pada tanggal 7 Juni 2024. Pelaksanaan Assesment dikerjasamakan dengan PT. ARA sebagai penyelenggaranya.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Assessment di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dilakukan secara daring pada tanggal 9 Maret 2024. Adapun rundown dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Kegiatan	Kategori
1	2 Maret 2024 08.00 - 09.00	Response dan Log in	Kejuragan
2	9 Maret 2024 08.00 - 09.00	Response Proses Assessment kepada Peserta	Partisipasi & Aktifitas
3	09.00 - 09.45	AMA Indonesia meresmikan IT yang sudah siap dan berjalan	Partisipasi & Aktifitas
Hari Pertama (9 Maret 2024)			
4	09.45 - 11.45	Pelaksanaan Presentasi (Power Point) - hari 1 & 2 slide	Partisipasi & Aktifitas
5	11.45 - 12.30	Penyediaan dan persiapan 3 peserta	Kejuragan
6	12.30 - 13.30	Ditunda	Kejuragan
7	13.30 - 14.30	Assesment berbasis kompetensi peserta ke 1 dan 2 dan 3	Partisipasi & Aktifitas
8	14.30 - 15.30	Assesment berbasis kompetensi peserta ke 3 dan 4 dan 5	Partisipasi & Aktifitas
9	15.30 - 16.30	Assesment berbasis kompetensi peserta ke 4 dan 5 dan 6 dan 7	Partisipasi & Aktifitas
10	16.30 - 17.30	Penyediaan dan persiapan 3 peserta	Kejuragan

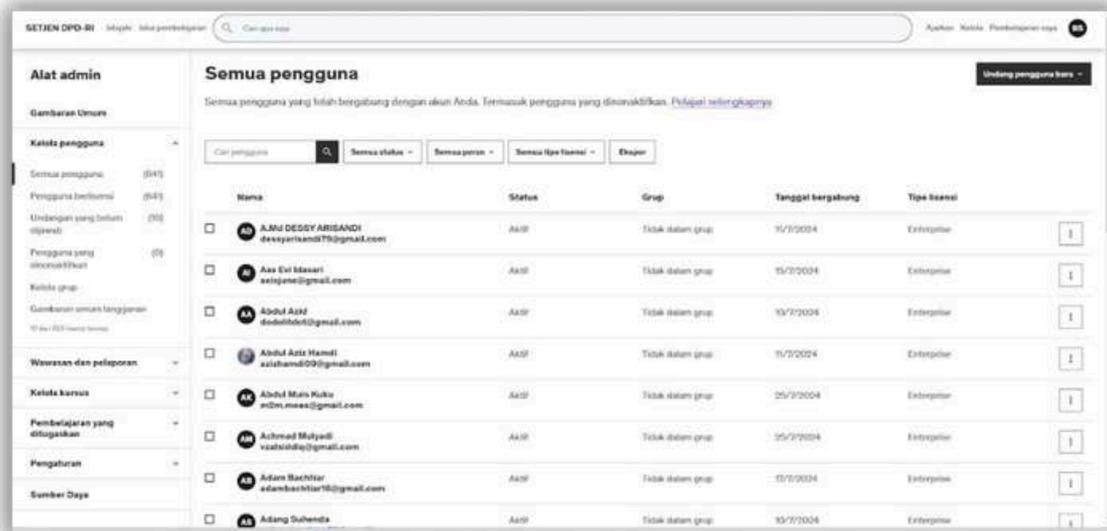
Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Assessment di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dilakukan secara daring pada tanggal 7 Juni 2024. Adapun rundown dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Kegiatan	Kategori
1	4 Juni 2024 08.00 - 09.00	Response dan Log in	Kejuragan
2	7 Juni 2024 08.00 - 09.00	Response Proses Assessment kepada Peserta	Partisipasi & Aktifitas
3	09.00 - 09.45	AMA Indonesia meresmikan IT yang sudah siap dan berjalan	Partisipasi & Aktifitas
4	09.45 - 11.45	Pelaksanaan Presentasi (Power Point) - hari 1 & 2 slide	Partisipasi & Aktifitas
5	11.45 - 12.30	Tanpa Tindakan 1	Kejuragan
6	12.30 - 13.30	Ditunda	Kejuragan
7	13.30 - 14.30	Assesment berbasis kompetensi peserta ke 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7	Partisipasi & Aktifitas
8	14.30 - 15.30	Assesment berbasis kompetensi peserta ke 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7	Partisipasi & Aktifitas

Upskilling dan Reskilling Pegawai

Upskilling Pegawai adalah proses pengembangan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional, mengembangkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Reskilling pegawai adalah proses pengembangan keterampilan dan kemampuan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari Reskilling yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengembangkan kemampuan pegawai untuk menghadapi tantangan baru, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan keterampilan, mempertahankan relevansi pegawai dengan perubahan teknologi. Untuk kedua kegiatan ini, Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan kerjasama dengan Udeemy sebagai platform digital yang menyediakan beragam bentuk materi yang dapat diakses oleh pegawai sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Juli-Desember 2024 dengan mengikutsertakan sebanyak 641 pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.



Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Keterampilan bagi Pejabat Fungsional

Selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2024, kegiatan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan jabatan fungsional yang terlaksana sebanyak 31 kegiatan dengan 296 orang Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Pelaksana yang terlibat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF : 14 orang peserta
2. Uji Sertifikasi PBJP : 26 orang peserta (5 orang dinyatakan lulus)
3. Diklat Teknis dan Diklat Penjurusan Fungsional : 22 orang peserta
4. Bimtek : 175 orang peserta
5. Workshop/ Sosialisasi/ Monev JF : 64 orang peserta
6. Rakernas/ Sarasehan JF : 5 orang peserta



Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional Pranata Humas



Ujian Sertifikasi PBJP di LKPP



Bimbingan Teknis Jurnalisme Tulis, Foto Dan Video, Serta Mobile Journalism



Sosialisasi Permenpanrb nomor 1 tahun 2023, dan Peraturan BKN nomor 3 dan nomor 4 tahun 2023 di Lingkup Unit APIP Setjen DPD RI

Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Tahun 2024.

Pada tanggal 29 November 2024 telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen DPD RI. Tahun ini mengangkat tema "Optimalisasi Strategi Pembelajaran Jabatan Fungsional di Era Disrupsi dan Implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional".

Kegiatan ini diikuti oleh 296 orang yang terdiri dari berbagai jenjang jabatan fungsional dan struktural di Setjen DPD RI termasuk yang berada di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Harapannya dalam rapat koordinasi ini memberikan manfaat yang besar bagi penguatan peran dan kinerja pejabat fungsional.



Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Institusi Dalam Negeri dan Luar Negeri

a. Kerja Sama Dalam Negeri

- Fasilitasi Sosialisasi dari Universitas Al Azhar Indonesia;
- Fasilitasi Sosialisasi dari Universitas Nasional;
- Fasilitasi Sosialisasi dari Universitas STIA LAN;
- Fasilitasi Sosialisasi dari Universitas Truno Joyo Madura terkait magang
- Fasilitasi Sosialisasi dari Universitas Kristen Satya Wacana terkait magang
- Pengembangan Kerjasama Dengan Universitas dan Sekolah di Indonesia melalui Kegiatan Fasilitasi Magang tahun 2024.

b. Kerja Sama Luar Negeri

Mengirimkan pegawai mengikuti *short course*, antara lain:

1. Muhammad Absar Salim, S.I.Kom. Pelatihan dari Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Tahun 2024/2025 "Progress to Proficiency Iteration-III" pada tanggal 3 s.d. 30 September 2024 di India
2. Diah Mayasari, S.Hum., M.I.Kom. Pelatihan Multilateral RRT "Seminar on Chinese Language and Culture for South-South Cooperation in Developing Countries" pada tanggal 9 s.d. 24 Oktober 2024 di Nanchang University, Jiangxi Province, RRT3
3. Reza Pratama Riansyah, S.Pd., M.Tr.Ap. Pelatihan Multilateral RRT "Seminar on Data Security Management Capacity Building for Developing Countries" pada tanggal 5 s.d. 20 November 2024 di The Development and Education Center of the Cyberspace Administration of China, Beijing City, RRT
4. dr. Nadya Shinta Nandra, M.K.K.K. Pelatihan dari Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Tahun 2024/2025 "Strategic Approaches for Health Technology Assessment" pada tanggal 02 s.d. 15 Desember 2024 di Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, India.

Penyampaian Informasi Penawaran Program Beasiswa Pendidikan S1, S2, dan S3 melalui IG OKK @okkdprdi

Biro OKK secara rutin menyediakan informasi mengenai kesempatan bagi Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program Beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan atau program kerjasama pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penyampaian informasi ini dilakukan secara rutin dan berkala melalui sosial media Biro OKK dan sosial media di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

4. ASPEK PROMOSI DAN MUTASI

Sepanjang tahun 2024, Biro OKK telah menerapkan sistem Promosi dan Mutasi PNS sebagai berikut:

1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Struktural dan Fungsional

Biro OKK memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan bagi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain:

- Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pengawas/Administrator pada tanggal 15 Januari 2024;



- Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pengawas/Administrator, Jabatan Fungsional, Jabatan CPNS menjadi PNS, dan Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK) pada tanggal 27 Maret 2024;



- Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional pada tanggal 1 November 2024.



2. Fasilitasi Mutasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

Biro OKK memfasilitasi pegawai yang mengajukan mutasi/pindah dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional melalui fasilitasi Uji Kompetensi ke Instansi Pembina. Selain itu, Biro OKK juga melakukan fasilitasi Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang bagi Pejabat Fungsional. Sepanjang tahun 2024, fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- Uji kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Mahir sebanyak 1 orang;
- Uji kompetensi mandiri Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama sebanyak 4 orang;
- Uji kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama sebanyak 2 orang ;
- Uji kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah Ahli Pertama sebanyak 2 orang;
- Uji kompetensi kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan PerUU Ahli Pertama sebanyak 1 orang;

Selain Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan, Biro OKK juga memfasilitasi Pejabat Fungsional yang bermaksud mutasi ke Jabatan Fungsional lain atau perpindahan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. Sepanjang tahun 2024, fasilitasi mutasi dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1) Perpindahan Jenjang Jabatan Fungsional :

- JF Arsiparis Mahir ke Jenjang Ahli Pertama sebanyak 2 orang.

2) Perpindahan dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional Lainnya:

- JF Perencana ke JF Penata Laksana Barang (PLB) Mahir sebanyak 1 orang.

3) Pengangkatan Pertama kedalam Jabatan Fungsional:

- Pengangkatan 96 orang Formasi PPPK Tahun 2023 ke dalam Jabatan Fungsional

4) Perpindahan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional :

- Perisalah Legislatif Ahli Muda sebanyak 2 orang;
- Analis Legislatif Ahli Muda sebanyak 1 orang;
- Pranata Humas Ahli Muda sebanyak 1 orang;
- Pranata Humas Ahli Madya sebanyak 1 orang;
- Inpassing Analis Legislatif Ahli Madya sebanyak 3 orang;

5. ASPEK MANAJEMEN KINERJA

Dalam rangka implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, Biro OKK berupaya melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai agar implementasi berjalan sesuai dengan aturan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yaitu:

- Penyusunan Mekanisme Pemantauan dan Pembinaan Kinerja Pegawai ASN dilaksanakan di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City pada tanggal 4 - 5 Maret 2024 dengan narasumber Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, BKN; dan Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara, Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal DPR RI;

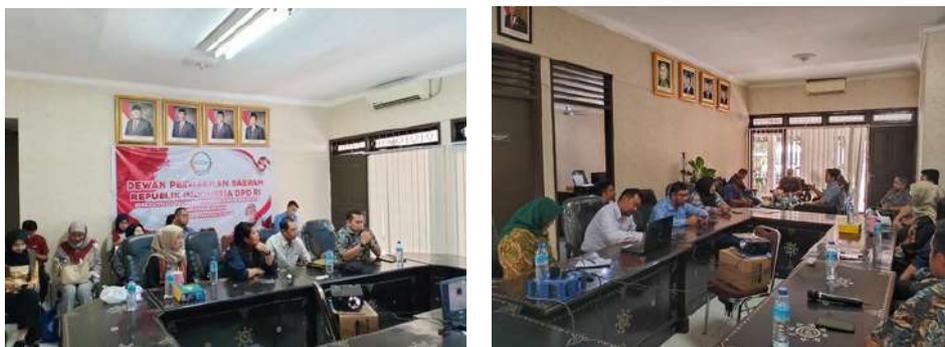
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi e-Kinerja BKN Bagi PPPK yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 dengan narasumber dari BKN;
- Studi Tiru Pengelolaan Manajemen Kinerja ASN ke Kantor BKD DI Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2024 sebagai Instansi yang telah menerapkan pengelolaan kinerja pegawai melalui Aplikasi e-Kinerja BKN.



F. ASPEK PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN

Sosialisasi Integrasi Sistem Kehadiran Kantor DPD Di Ibukota Provinsi

Dalam rangka menyosialisasikan sistem pemberian gaji berdasarkan integrasi catatan kinerja harian dan presensi secara luas, Biro OKK melakukan Sosialisasi Integrasi Sistem Kehadiran Kantor DPD Di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2024.



G. ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

1. Layanan Perlindungan dan Advokasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024

Biro OKK memberikan Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum melalui pendampingan hukum untuk Pegawai yang terkena kasus/permasalahan yang masih berhubungan dengan kinerja operasional. Biro OKK memberikan pendampingan hukum berupa konsultasi peraturan perundang-undangan dan pendampingan sampai proses pengadilan.



2. Fasilitas Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Biro OKK memberikan layanan kenaikan pangkat PNS dan kenaikan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional. Untuk kenaikan pangkat PNS Tahun 2024 dilaksanakan Kegiatan Finalisasi Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat PNS Melalui SIAN yang dilaksanakan di Hotel Fairmont pada tanggal 12 - 14 Februari 2024 dengan narasumber BKN.



Sedangkan untuk layanan Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional selama Tahun 2024, antara lain:

a) Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional :

- JF Pranata Humas sebanyak 4 orang
- JF Penerjemah sebanyak 2 orang
- JF Auditor sebanyak 4 orang
- JF Analis Kebijakan sebanyak 2 orang.

b) Kenaikan Jenjang Jabatan :

- JF Pranata Humas sebanyak 4 orang;
- JF Penerjemah sebanyak 2 orang;
- JF Auditor sebanyak 3 orang;
- JF Analis Kebijakan sebanyak 2 orang;
- JF Arsiparis sebanyak 2 orang;
- JF Fisioterapis sebanyak 1 orang.



Contoh SK Kenaikan Pangkat dan Jenjang JF Auditor

3. Fasilitas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Sekretariat Jenderal DPD RI

Dalam rangka memfasilitasi kenaikan pangkat pegawai ke dalam pangkat di atasnya, Biro OKK melaksanakan layanan Ujian Kenaikan Pangkat Tingkat I terhadap 5 (lima) PNS Sekretariat Jenderal DPD RI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari 2024.



Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Tahun 2024

4. Layanan Administrasi bagi ASN Sekretariat Jenderal DPD RI yang Memasuki Batas Usia Pensiun

Sepanjang tahun 2024, Biro OKK memberikan layanan administrasi kepada ASN yang memasuki batas usia pensiun. Sebanyak 11 (sebelas) orang ASN Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan layanan pensiun. Layanan berupa kepastian bagi ASN untuk mendapatkan hak-haknya pasca pensiun. Selain pengurusan pensiun ASN, Biro OKK juga melayani pengurusan administrasi pensiun bagi Janda/Duda Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.

5. Layanan Pengurusan Administrasi BPJS dan Mitra Kepegawaian bagi Pegawai

Dalam rangka menjamin perlindungan kesehatan bagi Pegawai, Biro OKK melayani pengurusan BPJS Kesehatan bagi ASN dan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPNPN Sekretariat Jenderal DPD RI.

6. Layanan Pengurusan Administrasi Pemberian Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada ASN

Dengan bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Biro OKK mengelola pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya dari Pemerintah RI kepada ASN Sekretariat Jenderal DPD RI. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya tahun 2024 diberikan kepada para PNS yang telah mengabdikan selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.



7. Layanan Kesehatan Bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI (Klinik Pratama DPD RI)

Dalam rangka menjamin kesejahteraan di bidang kesehatan, tidak hanya Anggota DPD RI dan Staf Ahli Anggota DPD RI, Biro OKK juga memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan menjamin seluruh pegawai beserta keluarga intinya mendapatkan fasilitas kesehatan setara Klinik Pratama. Saat ini Klinik Pratama DPD RI didukung oleh tenaga Fungsional Kesehatan di antaranya 2 (dua) orang Dokter Umum, 1 (satu) orang Dokter Gigi, 2 (dua) orang Fisioterapis, dan beberapa orang tenaga kesehatan lainnya. Selain layanan rutin yang dilakukan seperti pemeriksaan kesehatan dan layanan farmasi, sepanjang tahun 2024, Klinik Pratama DPD RI menyelenggarakan kegiatan antara lain:

- Pelaksanaan Vaksin Influenza Tahap 1 pada 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024 ;
- Pelaksanaan Vaksin Influenza Tahap 2 pada 16 Desember sampai dengan 20 Desember 2024.
- Klinik Pratama DPD RI bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Tanah Abang melakukan Pemeriksaan HPV DNA dan IVA Gratis 28 dan 31 Oktober 2024;
- Pelaksanaan stock opname Klinik Pratama yang dilaksanakan setiap akhir bulan;
- Kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada 26 September 2024.

H. ASPEK SISTEM INFORMASI

1. Pengembangan Layanan dalam Portal OKK Tahun 2024

a. Digitalisasi Layanan Kepegawaian

Pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Pembangunan Sistem Informasi Portal Pegawai ASN (Portal OKK) merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di mana setiap Instansi Pemerintah membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang berisi Informasi dan Data Pegawai ASN dan kedepannya akan terintegrasi dengan Sistem Manajemen Kepegawaian Nasional.

Portal OKK dibangun untuk menghimpun dan mengintegrasikan aplikasi yang terdapat di lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian untuk mendukung penerapan digitalisasi layanan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, keanggotaan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan hukum. Selanjutnya, Portal OKK dikembangkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, antara lain berkaitan dengan pengadministrasian kepegawaian secara profesional, akuntabel dan modern yang diharapkan dapat selaras dengan tujuan memberikan dukungan sistem keadministrasian kepegawaian yang tertib dan modern.

b. CAHBAGUS (Catatan Tugas Harian Berbasis Aplikasi Di Gadget Untuk Semua Pegawai)

Inovasi CAHBAGUS dibangun untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja pegawai, serta implementasi kebijakan pembayaran tunjangan kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Latar belakang pembangunan inovasi CAHBAGUS yaitu menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, terutama pada Area Penataan SDM Aparatur. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan rekomendasi, antara lain (1) peningkatan kualitas tata kelola reformasi birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani; (2) pengembangan dan penerapan aplikasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja; dan (3) memanfaatkan hasil penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja dan *reward and punishment*.

Implementasi pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor KP.07.08/01/DPDRI/I/2023 tentang Pedoman Implementasi Tunjangan Kinerja Pegawai Berdasarkan Capaian Kinerja dan Kehadiran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI wajib mengisi Catatan Tugas Harian pada CAHBAGUS sebagai bentuk laporan kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Pegawai meng-akses CAHBAGUS melalui <https://okk.dpd.go.id> dan mengisi catatan tugas harian berdasarkan jabatan dan uraian tugas. Adapun pelaksanaan tugas di-input sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan. Pegawai juga dapat melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti (evidence) pelaksanaan tugasnya. Catatan tugas harian yang telah di-input oleh pegawai selanjutnya disajikan dalam rekapitulasi kinerja secara periodik yang dimulai pada tanggal 21 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.

Evaluasi terhadap implementasi pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran dilaksanakan secara berkala oleh Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian. Adapun berdasarkan hasil evaluasi bahwa masih terdapat pegawai yang tidak sepenuhnya mentaati ketentuan pengisian catatan tugas harian dan pengajuan keberatan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, diterapkan periodisasi pengajuan keberatan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dalam rangka tertib administrasi dan untuk mendukung kelancaran pembayaran tunjangan kinerja setiap bulan.

c. Cuti Elektronik (CUTI-E)

Saat ini layanan cuti pegawai dilaksanakan secara manual dalam bentuk dokumen hardcopy. Permasalahan yang dihadapi yaitu seringkali menimbulkan kendala dalam pemberian layanan cuti dan pegawai menemui kesulitan untuk mengetahui saldo cuti yang dimiliki sehingga harus menanyakan terlebih dahulu kepada Subbagian Kesejahteraan, Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian.

Dengan adanya aplikasi CUTI-E maka layanan cuti pegawai dilaksanakan secara digital dalam sistem informasi yang akan memberikan kemudahan dan kecepatan layanan cuti kepada pegawai, dapat memberikan informasi saldo cuti yang dimiliki setiap pegawai, serta layanan cuti pegawai terintegrasi dalam Portal OKK. Aplikasi CUTI-E juga bermanfaat dalam efisiensi anggaran karena dapat menghemat penggunaan kertas (*paperless*).

d. KP 4 Digital

Inovasi KP4 DIGITAL dibangun berdasarkan permasalahan dokumen KP4 untuk keperluan administrasi tunjangan keluarga PNS masih dikelola dalam bentuk fisik (hardcopy) sehingga terdapat potensi dokumen yang hilang, data keluarga tidak update, serta menimbulkan kendala dalam verifikasi data oleh unit kerja terkait. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi pegawai selaku user dalam melakukan pemutakhiran data tunjangan keluarga pada Portal OKK di menu "Form Tunjangan KP4". Adapun manfaat inovasi KP4 DIGITAL untuk Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian, dan Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Honorarium yaitu untuk mendukung akurasi data tunjangan keluarga.

Tantangan dan kendala dalam melaksanakan capaian indikator:

1. Pada aspek Pengembangan Karir, penerapan *Talent Pool* masih mengalami kendala. Dalam rangka percepatan penerapan *Talent Pool*, Biro OKK perlu menyusun terlebih dahulu aspek-aspek penilaian manajemen talenta.
2. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi individu pada *assessment*, perlu disusun kembali rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka menengah;
3. Berdasarkan pemetaan kesenjangan kompetensi (hasil *assessment*), analisis kebutuhan diklat perlu mengacu pada setiap hasil *assessment* pegawai.
4. Biro OKK masih belum memanfaatkan sepenuhnya *hasil Assessment* dalam rangka pengembangan SDM. Hasil pemetaan kompetensi belum menjadi dasar pengembangan kompetensi pada area-area yang disarankan oleh assesor agar rencana dan program pengembangan kompetensi baik diklat, magang, praktik kerja, coaching dan mentoring ini dilaksanakan secara rutin.
5. Dalam aspek Promosi dan Mutasi, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI No. 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Seleksi Terbuka Pengisian JPT. Untuk Promosi dan Mutasi agar diselaraskan dengan *Grand Design* Manajemen Talenta (Penyusunan dan Pengembangan *Talent Pool*) yang sedang disusun, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI.
6. Dalam aspek Manajemen Kinerja, telah dilakukan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja pegawai dan terdapat pegawai yang memiliki kinerja kurang karena tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Namun belum digalakkan budaya dialog kinerja oleh Biro OKK dalam pembinaan atasan dan bawahan mengenai telaahan mengapa pegawai tersebut berkinerja kurang dalam PPKP-nya, dan terdapat kesimpulan untuk ambil langkah solusinya.
7. Dalam aspek Manajemen Kinerja, Penilaian Kinerja Pegawai menjadi pertimbangan dalam mengembangkan karir pegawai. Namun, pegawai yg memiliki PPKP Sangat Baik, belum diberikan penilaian yang obyektif dan dipromosikan untuk menduduki jabatan satu tingkat lebih tinggi. Penilaian Kinerja Pegawai juga perlu dijadikan aspek dalam membangun rancangan *talent pool*.



8. Dalam aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi ASN di Lingkungan DPD RI melalui Persekjen nomor 17 tahun 2022. Namun, belum terdapat penerapan pemberian penghargaan di sepanjang Tahun 2024.



Analisis Capaian Kinerja - 7



Sasaran 7

Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian



Indikator Sasaran 7



Rasio rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi Indikator Kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian

Pengertian Umum

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur efektivitas pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (Biro OKK). Rasio ini menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. IKU ini menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja biro dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola organisasi.

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah rencana aksi Indikator RB General sesuai lingkup tugas Biro OKK yang terlaksana dengan total rencana aksi yang telah ditetapkan dalam periode satu tahun. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan tingkat pencapaian dan implementasi rencana aksi yang optimal, sedangkan nilai yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program kerja

Metode Pengukuran

Metode pengukuran rasio ini dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Rasio = \frac{Jumlah\ Rencana\ Aksi\ yang\ Terlaksana}{Total\ Rencana\ Aksi\ yang\ Direncanakan} \times 100$$

Adapun langkah-langkah dalam proses pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Rencana Aksi

- Menginventarisasi seluruh rencana aksi masing-masing Indeks RB General yang diampu Biro OKK yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan telah diunggah dalam Portal RB.

2. Monitoring dan Evaluasi

- Menghimpun data realisasi dari masing-masing kegiatan yang masuk dalam rencana aksi.
- Mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan rencana aksi.



3. Analisis Data

- Membandingkan jumlah rencana aksi yang berhasil dilaksanakan dengan total rencana aksi yang telah dirancang.
- Menghitung rasio pencapaian dan menilai efektivitas implementasi rencana aksi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

4. Pelaporan

- Menyusun laporan kinerja berdasarkan hasil analisis untuk dievaluasi oleh pimpinan dan pemangku kepentingan terkait.

Capaian Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, capaian rasio realisasi rencana aksi Biro OKK adalah sebagai berikut:

- Total Rencana Aksi yang Direncanakan: 75 rencana aksi
- Jumlah Rencana Aksi yang Terlaksana: 75 rencana aksi
- Rasio Capaian: 100%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	75	75	100%

Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas implementasi rencana aksi dalam mendukung pencapaian target kinerja Biro OKK. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain:

1. Dukungan Kebijakan: Adanya kebijakan yang jelas dari pimpinan dalam mendorong pelaksanaan program kerja.
2. Koordinasi Internal: Sinergi yang baik antara unit kerja dalam mengawal pelaksanaan rencana aksi.
3. Sumber Daya: Pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran yang optimal.

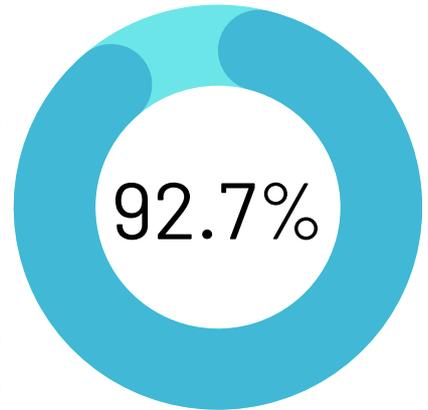
Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun mendatang, Biro OKK akan terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berkala, meningkatkan kolaborasi lintas unit, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

Kesimpulan

Indikator rasio rencana aksi yang terlaksana terhadap total rencana aksi merupakan alat ukur penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja Biro OKK. Capaian tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rasio 100%. Dengan strategi yang tepat, Biro OKK diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal.

■ Realisasi Anggaran

Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa melakukan upaya perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pelaporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Relisasi Anggaran Biro OKK sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp 23.239.740.596,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) atau terealisasi sebesar 92.69%.



Akuntabilitas keuangan atau akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting, karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat Laporan Keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.



Bab IV Penutup

Penutup

Laporan Kinerja Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Kedeputian Bidang Administrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Terhadap pencapaian kinerja Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan.

Melalui evaluasi tersebut Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian akan dapat mengupayakan berbagai langkah perbaikan secara konkrit, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI





Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian

